



STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MENGUNAKAN *LOGICAL FRAMEWORK ANALYSIS* (LFA) DI KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU

Julio Chandra P. Kusuma¹, Puji Astuti^{1*}, Firdaus Agus¹, Syartiwidya²

¹Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Riau

Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Pekanbaru 28284

²Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau

Jl. Gajah Mada No.200, Pekanbaru

*Corresponding Author: pujiastuiafrinal@eng.uir.ac.id

Article Info

Article history:

Received : Nov 08, 2024

Revised : Nov 21, 2024

Accepted : Nov 25, 2024

Abstract

The 2014–2018 Regional Income Expenditure Budget (APBD) execution target concurring to the territorial salary of Siak Rule has changed. Siak Regency's Locally Generated Revenue (PAD) diminished in 2016, 2017 and 2018. The decay in PAD in 2016 was due to diminished territorial wages from divisions coming about from the administration of isolated territorial riches and other legitimate territorial wage. In 2017, the diminish in PAD was due to a lessening in wage within the range of arrive assess and demands, particularly territorial charge comes about, whereas in 2018 the decline of PAD due to a diminish in income from the territorial assessment and other legitimate salary segments. In association with the issues raised, this considers employments expressive measurable strategies and the Logical Framework Analysis (LFA) method. The information found within the field will be utilized as the most information to analyze the distinguishing proof of the potential of Siak Regency Territorial Unique Income. At that point to analyze the variables that affect the Initial Territorial Salary of Siak Rule, moreover formulate/identify techniques to extend the First Territorial Salary in Siak Rule. Based on the comes about of the think about, the potential to extend Siak District's Unique Income comprises of expenses, charges, neighborhood companies, and the number of inhabitants. The ones that have the most prominent commitment to the PAD of Siak Rule are charges and client charges. Based on the comes about of different direct relapses, the relapse coefficient for the populace is more prominent, to be specific 11.772, taken after by GDP of 0.183, government investment of 5.513, and expansion of 1.489. In this way, the populace is the foremost overwhelming figure in impacting PAD in Siak district. The methodology to extend neighborhood income in Siak Rule comprises of objectives, goals, comes about, and activities/activities. There are four arrangement alternatives that ought to be considered in endeavors to extend PAD in Siak Rule, to be specific building framework, expanding speculation, expanding human resources, and making and altering directions as the operational standard for collecting nearby charges and demands in Siak Rule.

Keywords: Local Revenue, Retribution, Strategy, Taxes

1. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Sebagai salah satu sumber pendapatan utama, PAD menjadi indikator kemandirian keuangan daerah dan menentukan sejauh mana suatu daerah mampu melaksanakan tanggung jawab otonomi yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat [1]. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan otonomi daerah menjadi lebih terfokus, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola potensi daerahnya. Namun, pelaksanaan ini tidak lepas dari tantangan, terutama dalam mengelola PAD secara efektif guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan [2]. Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, PAD berperan sebagai sumber dana strategis untuk membiayai berbagai program pembangunan,

baik yang bersifat fisik seperti infrastruktur maupun non-fisik seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, pengelolaan PAD yang baik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.

Tujuan Pembangunan Ekonomi (menurut Jhingan, 1992) fokus pada pembangunan peralatan modal dalam skala besar untuk meningkatkan produktivitas di berbagai sektor: pertanian, pertambangan, perkebunan, dan industri. Modal juga diperlukan untuk pengembangan infrastruktur seperti sekolah, rumah sakit, jalan raya, dan jalan kereta api [3]. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari: pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dimiliki sendiri, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. PAD menggambarkan potensi keuangan suatu daerah, terutama berdasarkan faktor pajak dan retribusi daerah. PAD merupakan salah satu sumber dana utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, selain dana kompensasi, pinjaman daerah, dan pendapatan sah lainnya. Prinsip desentralisasi memberikan kebebasan kepada daerah untuk mencari sumber pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah. Dengan demikian, PAD memegang peran strategis dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah serta menjadi pilar penting dalam pembiayaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di tingkat lokal [4].

Pajak daerah merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung keuangan pemerintah daerah, termasuk di Kabupaten Siak, untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib dari orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah yang sifatnya tidak langsung memberikan imbalan. Hal ini berarti pajak tersebut lebih bersifat umum untuk kepentingan masyarakat secara luas, seperti peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi lokal [5]. Selain pajak, retribusi daerah juga menjadi sumber pembiayaan yang signifikan. Berbeda dengan pajak, retribusi adalah pembayaran yang dilakukan masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan atau manfaat langsung yang diberikan oleh pemerintah daerah, misalnya retribusi pasar, parkir, atau pelayanan kesehatan. Keduanya menjadi tumpuan penting bagi keberlangsungan pembangunan daerah yang berkelanjutan, sekaligus memastikan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Besaran PAD Kabupaten Siak bisa berbeda-beda sebab sumber pendapatan daerah belum sepenuhnya berkembang. Potensi peningkatan PAD di Kabupaten Siak belum dikelola secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Di Kabupaten Siak, PAD mengalami penurunan pada tahun 2016, 2017, dan 2018 [6]. Penurunan PAD pada tahun 2016 didorong oleh penurunan pendapatan daerah yang berasal dari sektor pengelolaan aset daerah tersendiri dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Penurunan PAD pada tahun 2017 disebabkan oleh menurunnya sektor pajak daerah dan retribusi khususnya pendapatan pajak daerah, sedangkan penurunan PAD pada tahun 2018 disebabkan oleh penurunan pendapatan pajak daerah dan pendapatan peraturan perundang-undangan lainnya [7]. Atas dasar itu, perlu dikaji perubahan kontribusi sektoral yang terjadi berdasarkan kebijakan pembangunan yang tepat. Instrumen kebijakan yang memberikan dampak optimal terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan penduduk.

2. METODE PENELITIAN

Wilayah studi dalam penelitian ini adalah Kabupatean Siak yang berada di Provinsi Riau dengan luas 9,74% total luas provinsi dengan mencapai luasan 8.556,09 km². Kabupaten Siak

sendiri merupakan wilayah terluas keenam kabupaten-kota yang ada di provinsi Riau dengan pusat administrasi terletak di Kota Siak Sri Indrapura [8]. Waktu pelaksanaan penelitian adalah 6 bulan. Terhitung pada tanggal 5 Mei sampai dengan 2 Oktober 2020 dalam kegiatan survey lapangan dan dokumentasi serta analisis data. Ruang lingkup materi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor apa saja yang berpotensi menjadi PAD di Kabupaten Siak dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi potensi PAD itu sendiri, baik pendukung atau penghambat. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode deskriptif: potensi PAD di Kabupaten Siak
2. Metode Regresi Linier Berganda: faktor-faktor yang mempengaruhi PAD di Kabupaten Siak
Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi PAD menggunakan regresi linier berganda dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \quad [9]$$

Model persamaan linear tersebut diestimasi melalui perangkat komputer SPSS. Tingkat signifikansi yang digunakan untuk menguji hipotesis baik adalah pada $\alpha=5\%$ atau pada tingkat keyakinan 95% dengan menggunakan uji t.

3. Metode *Logical Framework Analysis* (LFA): penyusunan strategi peningkatan PAD di Kabupaten Siak

Adapaun tahapan untuk penyusunan strategi menggunakan metode *Logical Framework Analysis* (LFA) adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi potensi yang dapat meningkatkan PAD.
- b. Menghitung kontribusi berbagai sektor yang dapat memberikan kontribusi terhadap PAD, seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya.
- c. Mengidentifikasi pihak-pihak atau stakeholder yang terkait dalam peningkatan potensi PAD
- d. Penyusunan strategi peningkatan PAD di Kabupaten Siak

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerimaan PAD Kabupaten Siak periode tahun 2014-2018 dapat diketahui pada tabel 1.

Tabel 1. Pertumbuhan PAD Kabupaten Siak Periode Tahun 2014-2018

Deskripsi	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Hasil Pajak Daerah	Rp. 53.260.000.000	Rp. 61.417.000.000	Rp. 223.035.994.649	Rp. 109.746.000.000	Rp. 98.770.032.475
Pertumbuhan	-	15.32%	26.31%	-50.79%	-10.00%
Hasil Retribusi Daerah	Rp. 11.870.977.000	Rp. 13.828.093.500	Rp. 17.026.000.000	Rp. 13.435.800.000	Rp. 17.871.168.000
Pertumbuhan	-	16.49%	23.13%	-21.09%	33.01%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. 169.692.233.244	Rp. 182.178.416.719	Rp. 34.716.358.769	Rp. 41.285.445.417	Rp. 66.715.565.857
Pertumbuhan	-	7.36%	-80.94%	18.92%	60.96%
Pendapatan dari sumber lainnya yang sah	Rp. 58.157.626.000	Rp. 87.273.481.721	Rp. 50.866.399.618	Rp. 101.814.732.552	Rp. 43.855.759.006

Pertumbuhan	-	50.06%	-41.72%	100.16%	-56.93%
Jumlah	Rp. 292.980,836.244	Rp. 344.696.991.940	Rp. 325.644.753.036	Rp. 266.281.977.969	Rp. 227.212.525.338

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel 1, dapat disimpulkan beberapa poin utama terkait kinerja PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Siak dari tahun 2014 hingga 2018:

1. Fluktuasi PAD: Pendapatan Asli Daerah menunjukkan pola yang tidak konsisten, dengan kenaikan dan penurunan selama periode tersebut.
2. Kinerja Pajak Daerah :
 - a. Pajak daerah mengalami peningkatan dari tahun 2014 ke 2015 sebesar 16,49%.
 - b. Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2017 dan 2018, meskipun secara umum cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
 - c. Pada tahun 2016, pajak daerah menurun hingga 80,94%, menunjukkan penurunan yang drastis dibandingkan tahun sebelumnya.
3. Kontribusi Sumber PAD :
 - a. Tahun 2014 dan 2015, sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi terbesar, masing-masing sebesar Rp 169.692.233.244,- dan Rp 182.178.416.719,-.
 - b. Tahun 2016, sektor pajak daerah menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi Rp 223.035.994.649,-.
 - c. Tahun 2017 dan 2018, sektor pajak daerah tetap menjadi penyumbang utama dengan nilai Rp 109.746.000.000,- dan Rp 98.770.032.475,-.
4. Hasil Pengelolaan Aset Daerah yang dipisahkan: pada tahun 2014, sektor ini mengalami peningkatan yang signifikan, menunjukkan kinerja pengelolaan aset yang cukup baik pada awal periode.
5. Pendapatan dari Sumber Lain yang Sah: memiliki pola yang fluktuatif menandakan ketidakstabilan dalam pendapatan dari komponen ini.

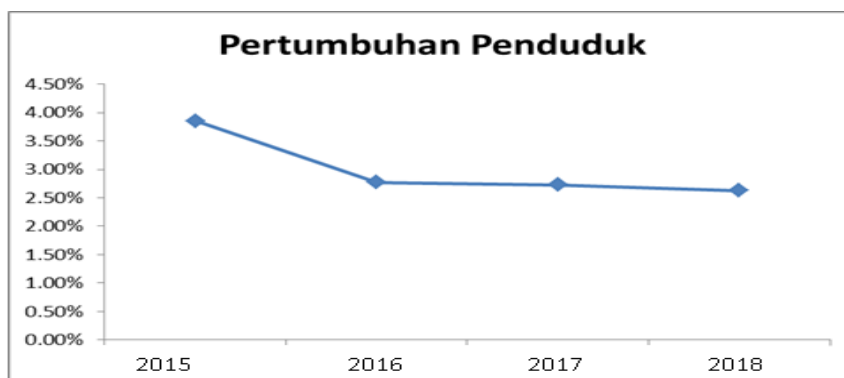
Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi dalam kontribusi sumber-sumber PAD, pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi komponen utama yang menopang pendapatan daerah Kabupaten Siak selama periode 2014-2018. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendanaan terpenting bagi Kabupaten Siak. Kontribusi terbesar Kabupaten Siak terhadap PAD berasal dari retribusi. Pada tahun 2014-2015, sektor-sektor penyumbang PAD Kabupaten Siak adalah yang muncul dari pengelolaan aset daerah tersendiri. Sedangkan pada tahun 2016 hingga 2018, dinas yang memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Siak adalah Dinas Pendapatan Pajak Daerah [11][12].

Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat Kabupaten Siak dalam membayar pajak mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk penerimaan PAD Kabupaten Siak mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Pada tahun 2014 penerimaan PAD Kabupaten Siak sebesar Rp. 292.980,836.244. Pada tahun 2015 penerimaan PAD Kabupaten Siak sebesar Rp. 344.696.991.940. Pada tahun 2016 penerimaan PAD Kabupaten Siak sebesar Rp 325.644.753.036. Pada tahun 2017 penerimaan PAD Kabupaten Siak sebesar Rp 266.281.977.969. Pada tahun 2018 penerimaan PAD Kabupaten Siak sebesar Rp. 227.212.525.338. Selama rentang lima tahun antara periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, penerimaan PAD terbesar terjadi pada tahun 2015 dan penerimaan PAD terkecil terjadi pada tahun 2018.

Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Siak yang berkelanjutan, beberapa upaya dan langkah strategis yang dapat dilakukan adalah:

1. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi:
 - a. Melakukan pemutakhiran data wajib pajak dan wajib retribusi secara berkala.
 - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak melalui kampanye edukasi.
 - c. Mengintegrasikan sistem pembayaran pajak berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi kebocoran.
2. Identifikasi dan Pemanfaatan Potensi Ekonomi:
 - a. Melakukan studi komprehensif untuk mengidentifikasi potensi ekonomi lokal yang belum tergarap.
 - b. Mengembangkan sektor unggulan, seperti pariwisata, pertanian, dan industri kreatif.
 - c. Menjalinkan kerja sama dengan pihak swasta untuk pengelolaan aset daerah.
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):
 - a. Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada aparatur pengelola pendapatan daerah.
 - b. Mengadopsi teknologi dan inovasi dalam pengelolaan pendapatan.
4. Reformasi Regulasi dan Kebijakan:
 - a. Menyusun regulasi yang mendukung kemudahan investasi.
 - b. Memberikan insentif kepada investor yang berkontribusi pada peningkatan PAD.
 - c. Memperbaiki sistem pengawasan untuk meminimalisir penyimpangan.
5. Pengembangan Infrastruktur Pendukung:
 - a. Meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
 - b. Mengoptimalkan aset daerah untuk meningkatkan produktivitas.
6. Transparansi dan Akuntabilitas:
 - a. Memastikan pengelolaan PAD dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Menyediakan laporan keuangan daerah secara terbuka kepada publik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

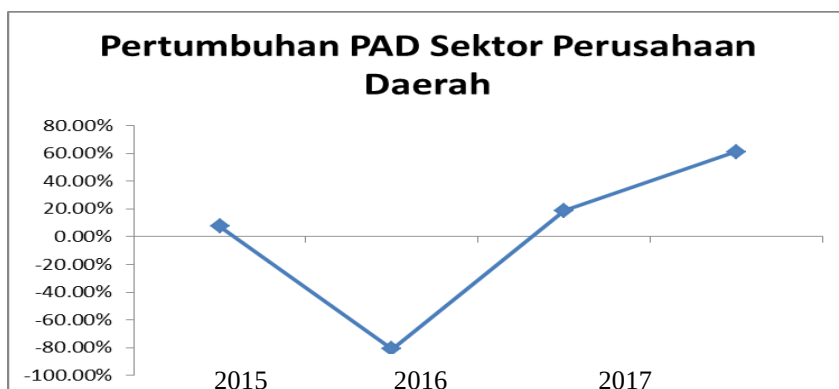
Langkah-langkah tersebut harus dilakukan secara sinergis dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Dengan pendekatan yang holistik, Kabupaten Siak dapat meningkatkan kemandirian finansialnya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Penduduk merupakan aset penting dalam menggerakkan pembangunan suatu daerah. Jumlah penduduk Kabupaten Siak mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk ini juga berpengaruh terhadap jumlah PAD Kabupaten Siak.



Sumber: Hasil Analisis, 2020

Gambar 2. Persentase Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Siak Tahun 2015-2018

Jumlah penduduk Kabupaten Siak meningkat setiap tahunnya dari tahun 2014 hingga 2018. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Siak dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sebesar 3%. Pertumbuhan penduduk di daerah Siak akan mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Semakin bertambahnya jumlah penduduk maka penerimaan pajak bagi penduduk juga semakin meningkat. Hal ini dapat mempengaruhi besaran PAD Kabupaten Siak. Pertumbuhan penduduk baik karena kelahiran maupun migrasi secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan PAD melalui penambahan sasaran pajak baru. Pemerintah Daerah Kabupaten Siak mempunyai wewenang dan tanggung jawab praktis yang seluas-luasnya dalam mengatur wilayahnya. Pemerintah daerah mempunyai hak untuk menguasai badan usahanya sendiri yang disebut juga BUMD yang menjadi sumber PAD. Prinsip menjalankan bisnis lokal tidak hanya didasarkan pada prinsip efisiensi ekonomi secara umum, tetapi juga pada penyediaan layanan dan pelayanan kepada masyarakat. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang didirikan oleh daerah untuk tujuan pembangunan ekonomi dan perluasan PAD.



Sumber: Hasil Analisis, 2020

Gambar 3. Persentase Pertumbuhan PAD Sektor Perusahaan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015-2018

Rata-rata laju pertumbuhan PAD sektor BUMD Kabupaten Siak sebesar 1,58% dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Pendapatan sektor korporasi daerah diketahui mengalami fluktuasi antara tahun 2014 hingga 2018. Pendapatan sektor korporasi daerah mencatat penurunan terkecil pada tahun 2016. Selama beberapa tahun berikutnya, pendapatan perlahan mulai

meningkat lagi. Pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah memperkuat potensi PAD di Kabupaten Siak, yang juga tercermin dari hasil pengelolaan asset segregrasi. Namun, hasil pengelolaan asset daerah merupakan sumber yang terpisah dari pengelolaan APBD.

3.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak

1. Inflasi

Tahun 2014 inflasi kabupaten Siak sebesar 3,88 % meningkat menjadi 3,92 % pada tahun 2015 dengan persentase pertumbuhan sebesar 1,03%. Pada tahun 2016 inflasi Kabupaten Siak menurun menjadi 3,42 % dengan persentase penurunan sebesar 12,76%. Pada tahun 2017 inflasi meningkat menjadi 3,65% dengan persentase pertumbuhan sebesar 6,37%. Inflasi pada tahun 2018 mengalami penurunan dengan persentase penurunan sebesar 25,75% sehingga inflasi pada tahun 2018 menjadi 2,71 %.

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk dapat mempengaruhi pendapatan daerah. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, permintaan terhadap barang-barang konsumsi juga meningkat. Jumlah penduduk Kabupaten Siak meningkat setiap tahunnya dari tahun 2014 hingga 2018. Pada tahun 2014, jumlah penduduk Kabupaten Siak sebanyak 424.499 jiwa. Pada tahun 2015, jumlah penduduk meningkat menjadi 440.841 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 3,85%. Pada tahun 2016 jumlah penduduk meningkat menjadi 453.052 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 2,77%. Pada tahun 2017, jumlah penduduk kembali meningkat menjadi 465.414 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 2,73%. Pada tahun 2018 jumlahnya meningkat menjadi 477.670 orang atau meningkat sebesar 2,63%.

3. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Siak pada tahun 2014 sebesar Rp. 2.547.677.640.488,- meningkat pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp.2.690.439.086.559,- dengan persentase pertumbuhan 5,60%. Pada tahun 2016 pengeluaran pemerintah menurun menjadi Rp. 1.686.810.743.578,- dengan persentase penurunan sebesar 37,30%. Pada tahun 2017 pengeluaran pemerintah kembali menurun menjadi Rp. 1.630.363.401.909,- dengan persentase penurunan sebesar 3,35%. Tahun 2018 pengeluaran pemerintah meningkat menjadi Rp.1.705.936.346.935,- dengan persentase pertumbuhan sebesar 4,64%.

4. Produk Domestik Regional Bruto

Pernyataan tersebut menggambarkan hubungan antara pendapatan, permintaan barang dan jasa, serta kemampuan masyarakat untuk membiayai pajak dan retribusi yang ditarik oleh pemerintah daerah. Di dalamnya juga terdapat data terkait Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Siak dari tahun 2014 hingga 2018, yang menunjukkan fluktuasi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Secara keseluruhan, PDRB Kabupaten Siak mengalami penurunan pada tahun 2015, namun kembali meningkat pada tahun 2016 dan seterusnya. Berikut adalah ringkasan dari data PDRB yang disebutkan:

- a. 2014 : PDRB Kabupaten Siak sebesar Rp 85.735.520.000.000
- b. 2015 : PDRB mengalami penurunan menjadi Rp 77.235.570.000.000, dengan penurunan sebesar 9,91%.
- c. 2016 : PDRB meningkat menjadi Rp 78.941.930.000.000, dengan penurunan yang lebih kecil, yaitu 2,21%.
- d. 2017 : PDRB kembali meningkat menjadi Rp 79.619.150.000.000, dengan pertumbuhan sebesar 0,86%.

- e. 2018: PDRB kembali meningkat menjadi Rp 84.673.930.000.000, dengan pertumbuhan sebesar 6,35%.

Penurunan PDRB pada 2015 mungkin disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi eksternal atau internal yang mempengaruhi wilayah tersebut. Namun, ada kecenderungan untuk pemulihan dengan pertumbuhan yang positif pada tahun-tahun berikutnya.

3.2. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, Kabupaten Siak

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi PAD Kabupaten Siak dilakukan analisis secara statistik dengan bantuan program SPSS. Estimasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan persamaan linier dari variabel terkait yaitu PAD Kabupaten Siak sebagai variabel dependen sedangkan variabel independen yaitu inflasi, jumlah penduduk dan rasio PP/PDRB. Hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat dari tabel 2 :

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Estimasi	Standar Deviasi	t - statistik	Signifi kansi
Intersept	-21.271	98.257	-0.216	0.864
Inflasi (X ₁)	0.183	0.621	0.295**	0.817
Jumlah Penduduk (X ₂)	3.517	7.407	0.475**	0.718
Rasio PP/ PDRB (X ₃)	0.044	0.043	1.011***	0.496
R ₂	0,659			

Sumber : Hasil Analisis SPSS, 2020

Dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = -21,271 + 0,183 X_1 + 3,517 X_2 + 0,044 X_2$$

Keterangan :

Y : PAD

a : Konstanta

b₁ : Koefisien regresi Variabel Inflasi

b₂ : Koefisien regresi Variabel Jumlah Penduduk

b₃ : Koefisien regresi Variabel PP/PDRB

X₁ : Inflasi

X₂ : Jumlah penduduk

X₃ : PP/PDRB

Hasil estimasi regresi dengan menggunakan data panel didapatkan bahwa koefisien variabel yang mempengaruhi PAD Kabupaten Siak yaitu inflasi, jumlah penduduk dan rasio pengeluaran pemerintah dan PDRB semuanya bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi PAD Kabupaten Siak mempunyai hubungan yang positif terhadap penerimaan PAD dimana semakin besar nilai nilai faktor-faktor yang mempengaruhi PAD maka semakin besar juga penerimaan PAD.

3.3. Analisis Strategi di dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siak

Untuk analisis strategi di dalam meningkatkan PAD Kabupaten Siak dengan menggunakan metode LFA. Metode LFA terdiri dari analisis stake holders, analisis program dan

analisis masalah. LFA merupakan instrument analisis yang dapat mengidentifikasi resiko dan potensial yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan hasil.

1. Analisis Stake Holders

- a. Sumber PAD : 1). Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, 2) Dana Perimbangan, dan 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

- b. Tujuan

Di dalam penyusunan strategi untuk meningkatkan PAD Kabupaten Siak, maka perlu adanya penetapan tujuan yang ingin dicapai. Penetapan tujuan sangat berkaitan langsung dengan strategi yang akan digunakan. Teridentifikasinya tiga kriteria yang paling dominan dalam menentukan besarnya PAD maka pemerintah perlu menerapkan strategi untuk memperkuat kriteria tersebut seperti menentukan subyek dan obyek pajak dengan jelas sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas harta/benda yang kena pajak. Pemerintah juga perlu mengadakan sosialisai untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi agar PAD dapat meningkat.

- c. Sasaran

Tercapai atau tidaknya target PAD yang telah ditetapkan dipengaruhi oleh kinerja aparat instansi terkait. Keterlibatan Bupati, dan Bappeda di dalam menetapkan target merupakan suatu kerjasama yang sinergis di dalam mencapai perolehan PAD yang tinggi di Kabupaten Siak. Untuk itu perlunya menetapkan sasaran strategi yang akan dilaksanakan. Masih ada objek pajak/retribusi yang belum tergali sehingga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan penerimaan PAD Kabupaten Siak. Masih terdapat potensi yang dapat digali menjadi objek pajak baru seperti pariwisata, transportasi, dan lain-lain. Potensi-potensi jika dikelola dengan baik akan dapat meningkatkan PAD. Oleh karena itu, sangat perlu penetapan sasaran dari pelaksanaan strategi dalam rangka peningkatan PAD Kabupaten Siak.

Tentu, peran kebijakan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif. Kebijakan yang baik akan memberikan landasan yang jelas dan terarah untuk mengoptimalkan potensi PAD, serta membantu dalam mengatasi berbagai kendala yang ada. Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur PAD di Kabupaten Siak perlu memperhatikan beberapa aspek ; Inovasi Sumber PAD, Efektivitas Pengelolaan Sumber PAD, Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas, Sinergi dengan Kebijakan Pusat, Pemberdayaan Masyarakat dan Sektor Swasta

Dengan kebijakan dan Perda yang lebih optimal, pengelolaan PAD di Kabupaten Siak diharapkan dapat mencapai hasil yang lebih maksimal.

- d. Hasil Spesifik

Sumber PAD yang berasal dari berbagai sektor memungkinkan untuk diadakan kerjasama dengan instansi lain. Adapun kerjasama yang akan dilakukan oleh Instansi Pengelola PAD adalah kerjasama dengan BPKP dalam memeriksa pembukuan penerimaan usaha wajib pajak, kerjasama dengan BKPM dalam hal perizinan dan kerjasama penanaman modal, dan juga kerjasama dengan Bank Riau-Kepri dalam hal penyertaan modal dan deposito. Kabupaten Siak sebagai kabupaten yang masih menata segala infrastrukturnya, masih membutuhkan biaya yang cukup besar, sedangkan PAD Kabupaten Kabupaten masih mengalami penurunan sehingga berdampak pada kegiatan pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut. Sehingga hal ini sangat terkait dengan penerimaan PAD yang masih mengalami penurunan. Selain itu akan berpengaruh terhadap ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Siak.

e. **Aktivitas/Kegiatan**

Pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Siak baik melalui kelahiran dan migrasi, secara tidak langsung dapat meningkatkan penerimaan PAD melalui penambahan objek pajak yang baru. Oleh karena itu, diperlukan kemajuan teknologi informasi terkait dengan penerimaan PAD. Kemajuan teknologi informasi dapat mempermudah pekerjaan terkait dalam penerimaan PAD. Kemajuan teknologi ini juga akan berdampak meningkatnya jumlah objek pajak karena semakin terbukanya peluang-peluang pengembangan usaha sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peningkatan PAD Kabupaten Siak sangat berperan di dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Siak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah Kabupaten Siak diarahkan untuk mengembangkan daerah Kabupaten Siak dan menserasikan laju pertumbuhan antar daerah di Indonesia. Dalam pengembangan daerah Kabupaten Siak sudah barang tentu dibutuhkan peningkatan pendayagunaan, potensi daerah secara optimal.

Berdasarkan analisis pemangku kepentingan pengambil kebijakan di Kabupaten Siak, secara umum terdapat empat alternatif kebijakan yang dipertimbangkan dalam upaya peningkatan PAD di Kabupaten Siak yaitu: 1) membangun infrastruktur, 2) meningkatkan investasi, 3) meningkatkan sumber daya manusia, serta 4) menerbitkan dan mengkoordinasikan peraturan pemungutan pajak dan retribusi. Keempat pilihan tersebut pada dasarnya ditentukan oleh empat faktor yang menjadi kunci utama keberhasilan pemungutan PAD Kabupaten Siak yakni optimalisasi pajak dan retribusi, minimalisasi kebocoran, sosialisasi pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah, serta peningkatan kinerja aparatur sipil negara. Hal yang sama berlaku untuk pengendalian inflasi. Strategi pengendalian inflasi adalah dengan memperkuat empat pilar strategis, antara lain keterjangkauan, kemudahan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Peningkatan nilai PAD disebabkan oleh kenaikan nilai dan harga barang dan jasa yang berkontribusi terhadap peningkatan nilai PAD di Kabupaten Siak.

2. Analisis Masalah

Kendala yang mungkin mempengaruhi peningkatan PAD di Kabupaten Siak diantaranya adalah belum jelasnya tujuan retribusi, masih lemahnya sumber daya keuangan dalam mekanisme pengelolaan PAD, serta belum adanya peraturan daerah dan kebijakan daerah Kabupaten Siak. Asal muasal PAD belum sepenuhnya dipahami dan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak masih kurang. Di era otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menggali sumber pendapatan daerah. Namun pada kenyataannya, pajak dan retribusi yang dikenakan oleh pemerintah daerah menimbulkan permasalahan bagi perekonomian daerah, dimana investor merasa dirugikan karena besarnya pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sehingga mengakibatkan berkurangnya investasi. Perkembangan politik dan ekonomi yang tidak stabil telah meningkatkan harga barang dan menurunkan daya beli masyarakat. Hal ini akan mempengaruhi syarat dan ketentuan kontrak wajib pajak serta menimbulkan hambatan dan kebingungan dalam pembayaran pajak. Akibat rendahnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, masih terdapat Wajib Pajak yang tidak membayar pajaknya tepat waktu. Hal ini akan berdampak pada penurunan PAD dari departemen pajak.

3. Analisis Program Peningkatan PAD

Program yang telah dilaksanakan pemerintah Kabupaten Siak di dalam menggali potensi pajak dan retribusi adalah menetapkan Peraturan Daerah mengenai objek wajib pajak dan retribusi. Seperti Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan [13]. Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum yang digunakan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak Kabupaten Siak ini diperlukan adanya peran serta dari penduduk Kabupaten Siak yang berfungsi sebagai obyek pajak. Pemerintah Kabupaten Siak telah melakukan sosialisasi secara kontinu kepada penduduk mengenai kewajiban di dalam membayar pajak dan retribusi. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan baik melalui penyuluhan langsung maupun melalui media cetak dan elektronik. Sektor lain yang juga memiliki kontribusi di dalam penerimaan PAD Kabupaten Siak adalah pendapatan dari perusahaan daerah. Hasil pendapatan dari perusahaan daerah termasuk ke dalam hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kabupaten Siak memiliki beberapa perusahaan daerah yang telah dikelola dengan cukup baik. Beberapa perusahaan daerah yang dimiliki Kabupaten Siak seperti PT Bank Riau Kepri, PT Permodalan Siak, PT Bumi Siak Pusako dan beberapa perusahaan lainnya. Perusahaan-perusahaan ini memberikan dampak yang positif terhadap PAD Kabupaten Siak. Perolehan laba dari perusahaan-perusahaan daerah tersebut juga menyumbang penerimaan PAD Kabupaten Siak walaupun kontribusinya tidak sebesar sektor pajak dan retribusi.

3.4. Rumusan Strategi

Berdasarkan hasil dari analisis maka dirumuskan strategi sebagai berikut:

Tabel 2. Strategi Peningkatan PAD Kabupaten Siak

No	Rencana Strategi	Pihak Terkait
1	Kajian pengembangan potensi PAD	BAPPEDA, Bagian Adminstrasi Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah (SETDA), BKAD
2	Peningkatan SDM khususnya bidang pajak-retribusi	BKAS, BPN, STPN, Bagian Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKKPD)
3	Penyusunan dan penyesuaian PERDA atau PERBUP	DPRD, Bagian Hukum SETDA, Bagian Adminstrasi Perekonomian SETDA, BKAD
4	Penyusunan Standar Operating Procedure (SOP) pemungutan dan penagihan pajak-retribusi	BKAD, Bagian Hukum SETDA, Bagian Organisasi SETDA, Bagian Adminstrasi Perekonomian dan SDA SETDA.
5	Intensifikasi PAD	BKAD, Inspektorat Daerah, Dinas Pariwisata, Bagian Adminstrasi Perekonomian dan SDA SETDA, Dinas KOMINFO, Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT), Dinas lainnya pengelola PAD, Bank Riau Kepri
6	Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi	Satpol PP, BKAD, Dinas Perhubungan, DPMPT, DPUPRKP, Inspektorat Daerah, Bagian Hukum SETDA, Bank Riau Kepri
7	Peningkatan koordinasi perencanaan dan pengawasan	BAPPEDA, BKAD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
8	Pembangunan infrastruktur informatika dan komunikasi	Dinas Kominfo, BKAD

No	Rencana Strategi	Pihak Terkait
9	Pengendalian inflasi dengan memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif	BAPPEDA, BKAD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Sumber: Hasil Analisis, 2020.

4. KESIMPULAN

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak dapat dioptimalkan melalui retribusi, pajak, perusahaan daerah dan jumlah penduduk.
- Faktor dominan yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak berdasarkan hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh terbesar terhadap PAD, dengan koefisien regresi sebesar 11,772. Artinya, setiap penambahan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Siak.
- Strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siak, ada empat alternatif alternative kebijakan yang dapat dipertimbangkan yaitu membangun infrastruktur, meningkatkan investasi, peningkatan SDM, dan pembuatan dan penyesuaian regulasi sebagai standar operasional pemungutan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Siak. Setiap kebijakan ini dapat saling melengkapi untuk menciptakan dampak yang lebih besar.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dan Program Studi PWK Fakultas Teknik Universitas Islam Riau atas bantuan data dan bimbingan selama penulis menyelesaikan penelitian ini.

REFERENSI

- [1] M. Hakim, "Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas," Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, 2017.
- [2] Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- [3] M.L. Jhingan. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan," Terjemahan. D. Guritno Rajawali, Jakarta, 1992.
- [4] Rajali, "Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Tentang Strategi Peningkatan Penerimaan Sektor Pajak di Kabupaten Aceh Tenggara)," Public Administration Journal Vol. 3 No. 2, 2018.
- [5] Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan retribusi Daerah.
- [6] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia,"Laporan Hasil Pemeriksaan RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2014-2018," Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau, 2019.
- [7] Peraturan Daerah No 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017.

- [8] F. A. Putra and P. Astuti, "The Policy of Modern Malay Residential Development Area in Siak Sri Indrapura, Riau Province," Indonesian Journal of Planning and Development Volume 2 No 1 February 2017, 2017.
- [9] Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D," Alfabeta, Bandung, 2018.
- [10] T. Wijaya, "Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis," Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007.
- [11] Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2016.
- [12] Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD Kabupaten Siak Tahun 2018.
- [13] Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.